OMBUDSMAN RI DORONG TRANSPARANSI DAN KEPASTIAN LAYANAN PERIZINAN PERIKANAN

Senin, 23 November 2026 - kalbar

PONTIANAK - Anggota Ombudsman RI, Syafrida Rasahan, mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor kelautan dan perikanan, khususnya dalam menjamin transparansi, kepastian perizinan, serta perlindungan sumber daya ikan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Penyadartahuan Ikan Endemik Kalimantan Barat yang berlangsung di Pendopo Gubernur Kalimantan Barat, Jumat (20/11/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Syafrida menegaskan bahwa kehadiran Ombudsman RI merupakan bagian dari upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan masyarakat dan pelaku usaha memperoleh layanan yang sesuai dengan ketentuan.

Syafrida menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di sektor perikanan perlu memperhatikan keseimbangan antara kepastian layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha dengan upaya pelestarian sumber daya ikan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh manfaat dari pengelolaan sumber daya tersebut.

"Menuju pelayanan publik prima ini tidak bisa hanya dilakukan dengan slogan, tapi memang harus dengan komitmen dari semua pihak, baik itu kementerian yang menyediakan layanan publik, pelaku usaha, masyarakat, dan juga akademisi," ujar Syafrida.

Lebih lanjut, Syafrida mendorong kalangan akademisi untuk berperan aktif memberikan masukan berbasis kajian ilmiah kepada kementerian terkait maupun pemerintah daerah. Menurutnya, kajian terhadap regulasi diperlukan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian ialah pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Syafrida mendorong kajian terhadap kemungkinan skema pengembalian manfaat PNBP kepada daerah agar penerimaan dari sektor perikanan dapat memberikan dampak yang lebih besar bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Sementara itu, Kepala Balai Pengelolaan Kelautan Pontianak, Syarif Iwan Taruna Alkadrie, menyampaikan komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui prinsip PASTI, yakni profesional, amanah, santun, terdepan, dan inovatif.

"Kehadiran langsung Anggota Ombudsman Republik Indonesia dan jajaran pimpinan pusat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada hari ini menjadi momentum penting untuk memastikan pelayanan perizinan dan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi berlangsung cepat, transparan, bebas pungli, dan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha," tegas Syarif Iwan.

Melalui kegiatan ini, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Kalimantan Barat mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan akademisi guna mewujudkan pelayanan perizinan perikanan yang transparan, akuntabel, serta mendukung kelestarian sumber daya ikan. (ORI Kalbar)